

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA				KET
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	0%	0%	0%	100%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	1,00	persen	1.585.225.000,00	Bidang PSDI dan Bidang SPPI				√	
								Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0,45	persen						√	
								Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	8,19	persen						√	
								Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas	1,017	US\$ Milyar						√	
								Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (PMA dan PMDN)	0,63	Triliun						√	
								Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembanguna n industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	81,00	persen						√	
								Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (orang)	271.644	orang						√	

					Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	81,00	%	1.585.225.000,00						
						Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	1,00	%							
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	Dokumen							
	25%	50%	75%	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3,00	Dokumen	162.520.000,00	Bidang PSDI	√	√	√	√	
	25%	50%	75%	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6,00	Dokumen	225.110.000,00	Bidang SPPI	√	√		√	
	25%	50%	75%	100%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5,00	Dokumen	1.197.595.000,00	Bidang SPPI	√	√	√	√	
	25%	50%	75%	100%	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	11,00	Dokumen		Bidang PSDI	√		√	√	
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0%	0%	0%	100%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai kewenangan yang dikendalikan	20,00	%	87.000.000,00	Bidang PSDI	√	√	√	√	
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	%	87.000.000,00	Bidang PSDI	√	√	√	√	

					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	%			√	√	√	√	
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	%			√	√	√	√	
	25%	50%	75%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	30,00	Perusahaan	87.000.000,00	Bidang PSDI	√	√	√	√	
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	10,00	%	63.040.640,00	Bidang SPPI	√	√	√	√	
					Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas	1.115,00	Unit	63.040.640,00	Bidang SPPI	√	√	√	√	
						Periode penyampaian infomasi Industri Kewenangan Provinsi	12,00	Bulan		Bidang SPPI	√	√	√	√	

							Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1,00	Dokumen	66.000.000,00	Bidang SPPI		√	√	√	
2	eningkatnya Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	0%	0%	0%	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	6,00	%	169.520.000,00						
							Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	6,00	Produk		Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	
							Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Kegiatan Peningkatan Produk Ekspor	2,00	Kegiatan	169.520.000,00	Bidang Pengembangan Perdagangan					
							Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	100,00	Pelaku Usaha	-		√	√	√	√	
		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	0%	0%	0%	100%	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	50,00	%	141.550.000,00	Bidang Pengembangan Perdagangan					
							Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi penggunaan Produk dalam Negeri	5,00	Kali	141.550.000,00	Bidang Pengembangan Perdagangan					
							Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	6,00	UMKM	141.550.000,00	Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	

							Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Mou Kemitraan UKM		Dokumen		Bidang Pengembangan Perdagangan					
							Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		UMKM	-	Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	
							Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Informasi Perdagangan	11,00	Kab/Kota		Bidang Pengembangan Perdagangan					
							Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2,00	Dokumen		Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	
3	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	25%	50%	75%	100%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	%	232.520.000,00	Bidang PKTN	√	√	√	√	
								Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	46,60	%	189.481.253,00	Bidang PKTN	√	√	√	√	
								Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	67,00	%	1.046.959.223,00	UPTD BPSMB	√	√	√	√	
								Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	79 (indeks B)	(indeks B)		UPTD BPSMB	√	√	√	√	
							Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	11,00	Kab/Kota	232.520.000,00						
							Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3,00	BPSK	-		√	√	√	√	
							Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		LPKSM	-						

					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20,00	Pengaduan	232.520.000,00	Bidang PKTN	√	√	√	√	
					Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan barang beredar/atau jasa	11,00	Kab/Kota	189.481.253,00						
					Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	9,00	Laporan	189.481.253,00	Bidang PKTN	√	√	√	√	
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	100,00	%		Bidang PKTN					
						Persentase Tertib Usaha	62,00	%							
					Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengendalian usaha perdagangan	13,00	Pelaku Usaha		- Bidang PKTN					
					Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	6,00	Dokumen		- Bidang PKTN	√	√	√	√	
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	92,00	%	72.120.000,00	Bidang PKTN					
						Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,90	%	2.550.000.000,00	Bidang Pengembangan Perdagangan					
					Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Periode pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	12,00	Bulan		- Bidang Pengembangan Perdagangan					

					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	11,00	Laporan	-	Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	6,00	Laporan	-	Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	
					Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok Bapok dan Bapokting	12,00	Bulan	2.550.000.000,00						
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	-	Laporan	-						
					Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11,00	Laporan	2.550.000.000,00	Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	11,00	Kab/Kota	72.120.000,00						
					Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	-	Laporan		Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	
					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	11,00	Laporan	72.120.000,00	Bidang Pengembangan Perdagangan	√	√	√	√	

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	25%	50%	75%	100%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	78 (indeks B)	(indeks B)		UPTD BPSMB					
							Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian mutu produk	2.515,00	Parameter	1.046.959.223,00	UPTD BPSMB					
								Jumlah PAD jasa Pelayanan Laboratorium	180.000.000,00								
								Periode Penerapan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017	12,00	Bulan							
								Periode Layanan Pengujian dan Kalibrasi di UPTD BPSMB	12,00	Bulan							
							Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	-	Komoditi							
							Pemantauan Mutu Produk	Jumlah Produk Potensial yang dipantau	4,00	Produk	10.320.932,00	UPTD BPSMB				√	
							Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	2.515,00	Dokumen	670.063.679,00	UPTD BPSMB	√	√	√	√	
							Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	2,00	Sertifikat							
							Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	487,00	Sertifikat	366.574.612,00	UPTD BPSMB	√	√	√	√	
		Nilai SAKIP	25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	BB		14.949.952.527,00	Sekretariat					
								Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah								
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	7,00	Dokumen	308.503.941,00	Sekretariat					

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6,00	Dokumen	308.503.941,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	-	Sekretariat	√	√	√	√	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	Laporan		Sekretariat	√	√	√	√	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Keuangan	12,00	Bulan	13.424.051.049,00	Sekretariat					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14,00	Orang/ Bulan	13.179.971.049,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	Dokumen	244.080.000,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,00	Dokumen		Sekretariat	√	√	√	√	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	-	Dokumen	-	Sekretariat					
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	Sekretariat	√	√	√	√	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jambi	175,00	Orang	-	Sekretariat					
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1,00	Paket	-	Sekretariat	√	√	√	√	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5,00	Dokumen	-	Sekretariat	√	√	√	√	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30,00	Orang/Kali	-	Sekretariat	√	√	√	√	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00	Bulan	462.358.142,00	Sekretariat					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket		Sekretariat	√	√	√	√	

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	Paket	41.273.742,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5,00	Paket	62.635.000,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60,00	Dokumen	7.229.400,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	Laporan	351.220.000,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12,00	Bulan	467.882.477,00	Sekretariat					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	Laporan		Sekretariat					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	467.882.477,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan		Sekretariat	√	√	√	√	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12,00	Bulan	287.156.918,00	Sekretariat					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30,00	Unit	205.100.000,00	Sekretariat	√	√	√	√	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2	5,00	Unit	17.700.000,00	Sekretariat			√	√	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20,00	Unit	64.356.918,00	Sekretariat	√	√	√	√	

